

Pengaruh Upah Minimum dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Provinsi Bali

I Made Sedana Yoga¹, I Komang Trisna Eka Putra², Rochmad Bayu Utomo³

¹Manajemen, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa
Denpasar, Indonesia

²Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti
Denpasar, Indonesia

³Akuntansi, Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Bantul, Indonesia

e-mail: sedanayoga70@gmail.com¹, komangeka9@gmail.com², bayu@mercubuana-yogya.ac.id³

Received : December, 2022

Accepted : December, 2022

Published : December, 2022

Abstract

The significant increase in the number of poor and unemployed people in the Province of Bali over the past two years as part of the impact of the Covid-19 pandemic which hit the joints of the economy has become a new problem that deserves further handling. This research is focused on discussing the causes of poverty by focusing on the employment aspect which includes wages and unemployment, as well as the educational aspect which is represented by the literacy rate indicator. The research objectives in this study are: (1) to analyze the effect of minimum wages and literacy rates on unemployment in Bali Province; (2) to analyze the effect of minimum wages, literacy rates, and unemployment on poverty in Bali Province; and (3) to analyze the role of unemployment in mediating the effect of minimum wages and literacy rates on poverty in Bali Province. The approach used in this study is a quantitative approach. This study uses path analysis techniques in hypothesis testing. Secondary data were obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Bali Province, and this study combined time series data and cross sectional data or in the form of panel data. The data processing aids used were Microsoft Excel and Eviews version 10. The results showed that (1) the minimum wage and literacy rate had a positive but not significant effect on unemployment; (2) the minimum wage has a negative and insignificant effect on poverty, the literacy rate has a direct negative and significant effect on poverty, and unemployment has a direct positive and significant effect on poverty; and (3) unemployment does not mediate the effect of minimum wages and literacy rates on poverty in Bali Province.

Keywords: Minimum Wage, Literacy Rate, Unemployment, Poverty.

Abstrak

Peningkatan signifikan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Provinsi Bali selama dua tahun terakhir sebagai bagian dari dampak pandemi *Covid-19* yang menghantam sendi perekonomian menjadi sebuah masalah baru yang patut untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan untuk membahas penyebab kemiskinan dengan menitikberatkan pada aspek pekerjaan yang mencakup upah dan pengangguran, serta aspek pendidikan yang direpresentasikan dengan indikator angka melek huruf. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan angka melek huruf terhadap pengangguran di Provinsi Bali; (2) untuk menganalisis pengaruh upah minimum, angka melek huruf, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali; dan (3) untuk menganalisis peran pengangguran memediasi pengaruh upah minimum dan angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur dalam pengujian hipotesis. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, dan penelitian ini menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) atau berupa *data panel*. Alat bantu pengolahan data yang digunakan adalah *Microsoft Excel* dan *Eviews* versi 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) upah minimum dan angka melek huruf berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran; (2) upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, angka melek huruf secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan; serta (3) pengangguran tidak memediasi pengaruh upah minimum dan angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Kata Kunci: Upah Minimum, Angka Melek Huruf, Pengangguran, Kemiskinan.

1. PENDAHULUAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah visi dan misi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, yang merupakan rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan bangsa yang berkelanjutan dapat difokuskan pada tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan ketersediaan dan pemerataan kebutuhan dasar kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*material well-being*), dan meningkatkan keberfungsian masyarakat memperluas pilihan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupan mereka (Todaro, 2011). Bahwa hasil pembangunan selama ini telah meningkatkan kesejahteraan rakyat di satu sisi dan menyisakan persoalan kemiskinan di sisi lainnya.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu dari tiga nilai inti pembangunan, yaitu nilai kecukupan yang diartikan sebagai kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya finansial, tidak terlepas dari kemampuan individu untuk mencari sumber pendapatan, yang mempengaruhi pendapatan yang diterima setiap orang per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin banyak kuantitas dan kualitas kebutuhan dasar yang dapat dipenuhi oleh setiap individu untuk menghindari jebakan kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program pembangunan antara lain: Gerakan Pembangunan Desa Terpadu atau Gerbang Sadu Mandara (GSM) dimulai pada tahun 2012, Bedah Rumah pada tahun 2010, Sistem Pertanian Terpadu atau

Simantri pada tahun 2009 dan pemberian bantuan kepada Subak dan Desa Pakraman dimulai sebelum program lainnya hingga saat ini. Jumlah penduduk miskin yang persentasenya bervariasi dari tahun ke tahun di Provinsi Bali seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1, tidak berarti kegagalan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, mengingat hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat akan dicapai dalam jangka waktu yang panjang, serta faktor yang mempengaruhi pengentasan kemiskinan mencakup aspek multi dimensi.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Bali
Tahun 2012-2021

Tahun	Penduduk Miskin	
	Jumlah (ribu jiwa)	Persentase (persen)
2012	158,95	3,95
2013	182,77	4,49
2014	196,00	4,76
2015	196,71	4,74
2016	178,18	4,25
2017	180,13	4,25
2018	171,76	4,01
2019	163,85	3,79
2020	165,19	3,78
2021	201,97	4,53

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi selama sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 2012-2021. Data tersebut juga menggambarkan bahwa selama kurun waktu dua tahun terakhir, terjadi kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali. Bahkan pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali melonjak hingga menjadi tahun dengan jumlah penduduk miskin terbanyak dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sehingga turut berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali.

Provinsi Bali merupakan Provinsi yang menggantungkan sektor utama perekonomiannya dari pariwisata. Larangan bepergian dan pembatasan kegiatan saat awal kemunculan pandemi *Covid-19* tentu berimbas pada sektor perekonomian di Provinsi Bali, khususnya sektor pariwisata. Akibatnya banyak usaha yang bergerak pada sektor pariwisata menutup sementara usahanya, serta tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun merumahkan karyawannya. Kondisi ini tentu sangat berdampak pada masyarakat yang menggantungkan pekerjaannya dari sektor pariwisata, karena mereka kehilangan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Dampak pandemi *Covid-19* bukan hanya dirasakan oleh masyarakat yang bergelut pada sektor pariwisata saja, namun juga berdampak luas pada masyarakat yang bergelut di berbagai sektor. Hal ini karena adanya pembatasan kegiatan sehingga gerak masyarakat untuk memutar roda perekonomian menjadi terbatas. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mengherankan apabila jumlah pengangguran menjadi meningkat, seiring dengan banyaknya PHK dan usaha yang goyah akibat pandemi. Data mengenai jumlah pengangguran di Provinsi Bali selama tahun 2012-2021 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2
Jumlah Pengangguran Provinsi Bali
Tahun 2012-2021

Tahun	Pengangguran	
	Jumlah (jiwa)	Persentase (persen)
2012	48.230	2,10
2013	41.820	1,83
2014	44.126	1,90
2015	47.210	1,99
2016	46.484	1,89
2017	36.143	1,48
2018	35.811	1,40
2019	39.288	1,57
2020	144.500	5,63
2021	138.669	5,37

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2022

Tabel 2 menggambarkan bahwa pengangguran di Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama sepuluh tahun terakhir. Namun terdapat hal yang mencuri perhatian, yaitu peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Dampak penurunan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali akibat adanya pandemi *Covid-19* nyata adanya, hingga berdampak pada meningkatnya

jumlah pengangguran pada masyarakat. Kondisi ini tentu membutuhkan solusi agar pengangguran dan jumlah penduduk miskin dapat ditekan agar tercapainya kesejahteraan pada masyarakat di Provinsi Bali.

Bank Dunia dalam Houghton dan Khander (2012) menyebutkan bahwa terdapat tiga penyebab utama kemiskinan, yaitu 1) kerentanan terhadap bencana, isolasi dan keterpencilan, tata kelola pemerintahan, dan ketimpangan (karakteristik wilayah); 2) ketersediaan infrastruktur, akses lainnya atau investasi fisik, dan modal sosial (karakteristik masyarakat); dan 3) demografis, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan rumah tinggal (karakteristik rumah tangga dan individu). Jauh sebelum pernyataan Bank Dunia, Soekartawi (1996) menyatakan bahwa sumber kemiskinan tidak hanya dari dimensi ekonomi, namun bersumber juga dari dimensi non-ekonomi seperti antara lain : produktivitas tenaga kerja, pengangguran, dan pendidikan. Berdasarkan penelitian dan fakta yang ada tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada penyebab kemiskinan non-ekonomi dan penyebab ketiga yang diutarakan Bank Dunia, yaitu aspek pekerjaan yang mencakup upah dan pengangguran serta aspek pendidikan yang direpresentasikan dengan indikator angka melek huruf.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan adalah upah minimum. Sistem pengupahan yang telah banyak diterapkan di beberapa negara pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi (Sulistiawati dan Rini, 2012). Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai yang diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Peningkatan upah minimum dapat menarik minat tenaga kerja untuk bekerja karena adanya peningkatan pendapatan yang akan diperolehnya. Peningkatan pendapatan akan menyebabkan peningkatan standar kebutuhan hidup yang layak sehingga turut berdampak pula dalam menekan kemiskinan. Namun di pihak lainnya, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan beban perusahaan karena besarnya biaya gaji yang dibayarkan oleh perusahaan sehingga tidak menutup kemungkinan apabila perusahaan mengambil tindakan efisiensi tenaga kerja yang berdampak

pada menurunnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan adalah angka melek huruf yang merupakan salah satu indikator dalam aspek pendidikan. Menurut Septiana dkk. (2015), pendidikan yang lebih luas merupakan modal manusia agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Berbekal pendidikan yang ditempuh dan pengetahuan yang dimiliki, seseorang dapat mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan yang dilakoni tersebut akan memberikan penghidupan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga secara tidak langsung dapat turut berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis hubungan antara aspek upah minimum dan angka melek huruf terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali". Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis pengaruh upah minimum dan angka melek huruf terhadap pengangguran di Provinsi Bali; (2) untuk menganalisis pengaruh upah minimum, angka melek huruf, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali; dan (3) untuk menganalisis peran pengangguran memediasi pengaruh upah minimum dan angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Hipotesis Penelitian

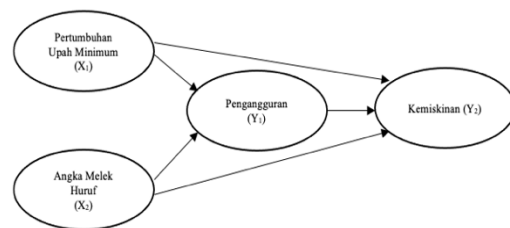
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

- H₁ : upah minimum dan angka melek huruf berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Bali.
- H₂ : upah minimum, angka melek huruf, dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.
- H₃ : pengangguran memediasi pengaruh upah minimum dan angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan tingkat eksplanasi penelitian, penelitian ini berbentuk penelitian asosiatif dengan tipe kausalitas, dan pengujian hipotesis dilakukan

dengan teknik analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data panel digunakan dalam penelitian ini dengan menggabungkan data runtut waktu (*time series*) dari tahun 2011-2021 dan data silang (*cross section*) dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi tiga, yaitu (1) variabel endogen, yaitu kemiskinan (Y_1); (2) variabel intervening, yaitu pengangguran (Y_2); dan (3) variabel eksogen, yaitu upah minimum (X_1) dan angka melek huruf (X_2). Penelitian ini menggunakan alat pengolah data, yaitu *Microsoft Excel* dan *Eviews* versi 10. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian

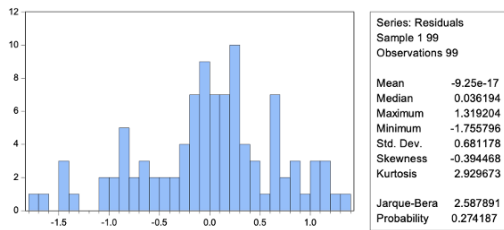
HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum analisis jalur dilakukan, model penelitian harus memenuhi persyaratan uji statistik yakni uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, baik untuk model sub struktural I (model persamaan struktural untuk hubungan variabel X_1 , X_2 , dan Y_1), maupun untuk model sub struktural II (model persamaan struktural untuk hubungan variabel X_1 , X_2 , Y_1 dan Y_2).

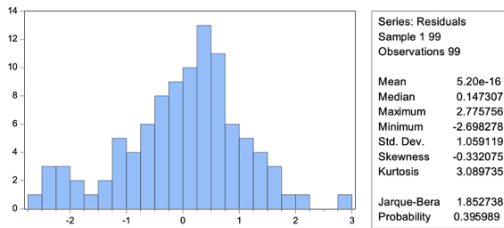
Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi yang normal. Pengujian normalitas yang sering digunakan adalah uji *Jarque-Bera* (JB). Uji JB adalah salah satu metode pengujian yang digunakan untuk sampel besar (*asymptotic*). Apabila nilai probability > 0,05, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.



Gambar 2a
Uji Normalitas Model Sub Struktural I



Gambar 2b
Uji Normalitas Model Sub Struktural II

Berdasarkan gambar 2a dan 2b diatas, nilai *jarque-bera* sebesar 2,587891 pada model sub struktural I dengan nilai *probability* sebesar 0,274187, dan nilai *jarque-bera* sebesar 1,852738 pada model sub struktural II dengan nilai *probability* sebesar 0,395989, maka dengan dimana nilai *probability* lebih besar dari 0,05 sehingga kedua model tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dapat dilihat melalui korelasi setiap variabel. Apabila nilai VIF < 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi. Sama halnya dengan uji normalitas sebelumnya, pada uji multikolinieritas ini dilakukan juga pada dua model sub struktural seperti pada hasil tabel berikut.

Tabel 3.a
Uji Multikolinieritas Model Sub Struktural I

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1.491934	311.8234	NA
Upah Minimum	1.58E-14	11.31772	1.233860
Angka Melek Huruf	0.000208	353.8974	1.233860

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 3.b
Uji Multikolinieritas Model Sub Struktural II

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.654493	312.6586	NA
Upah Minimum	3.86E-14	11.32328	1.234466
Angka Melek Huruf	0.000512	356.9303	1.244434
Pengangguran	0.025447	1.814371	1.013385

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3a dan 3b diatas, nilai *Centered VIF* pada X_1 dan X_2 adalah yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat dinyatakan bahwa

kedua model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model prediksi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018:137). Apabila nilai probabilitas X_1 dan $X_2 > 0,05$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

Tabel 4.a
Uji Heteroskedastisitas Model Sub Struktural I

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.927667	0.742848	-1.248798	0.2148
Upah Minimum	1.38E-07	7.64E-08	1.805972	0.0741
Angka Melek Huruf	0.013410	0.008771	1.528999	0.1296

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 4.b
Uji Heteroskedastisitas Model Sub Struktural II

Variable	Coefficient
R - squared	0.368130
Chi-squared hitung	36,44487
Chi-squared tabel	122,1077

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4a diatas yang menggunakan kaidah Tes Glejser, nilai *Probabilitas* pada X_1 adalah sebesar 0,0741 dan nilai probabilitas pada X_2 adalah sebesar 0,1296 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa pada model sub struktural I tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Kemudian sesuai hasil Tabel 4.b di atas yang menggunakan kaidah Uji White, diperoleh Chi Square hitung < Chi Square tabel, maka pada model sub struktural II juga tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Ghozali (2018) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah autokorelasi. Apabila nilai $-2 < DW < 2$, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini.

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson (DW) Stat
Sub Struktural I	1.024634
Sub Struktural II	0.636625

Sumber: data diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 diatas, nilai *Durbin-Watson* pada model sub struktural I adalah sebesar 1,024634, sehingga dengan kriteria $-2 < DW < 2$, maka nilai tersebut menggambarkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi ini. Selanjutnya nilai *Durbin-Watson* pada model sub struktural II adalah sebesar 0,636625, maka hasil tersebut juga menggambarkan tidak adanya masalah autokorelasi dalam model regresi ini.

Uji Hipotesis

Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Provinsi Bali

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung antar variabel atau konstruk yang besarnya ditunjukkan oleh nilai signifikansinya pada level 0,05 dengan *P-value* $< 0,05$ dan ditunjukkan oleh nilai *t-statistik* $> t$ -tabel = 1,98. Hasil analisis data untuk mengetahui tujuan penelitian pertama yaitu menganalisis pengaruh angka melek huruf dan upah minimum terhadap pengangguran disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6
Pengaruh Upah Minimum dan Angka Melek Huruf terhadap Pengangguran di Provinsi Bali

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.619374	1.221447	-0.507082	0.6133
Upah Minimum	2.73E-08	1.26E-07	0.217153	0.8286
Angka Melek Huruf	0.013081	0.014421	0.907046	0.3667

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 6 menunjukkan bahwa secara langsung variabel upah minimum (X1) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran (Y1). Nilai *t*-hitung dari upah minimum (X1) terhadap pengangguran (Y1) lebih kecil dari *t*-tabel (0,217153 $<$ 1,98) dan nilai *P value* lebih dari 0,05 (0,8286 $>$ 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa upah minimum secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Hal ini berarti peningkatan nilai upah minimum tidak menyebabkan terjadinya peningkatan nilai pengangguran.

Variabel angka melek huruf (X2) secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel pengangguran (Y1). Nilai *t*-hitung dari angka melek huruf (X2) terhadap pengangguran (Y1) lebih kecil dari *t*-tabel (0,907046 $<$ 1,98) dan nilai *P value* lebih dari 0,05 (0,3667 $<$ 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa angka melek huruf secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran. Hal ini berarti peningkatan nilai angka melek huruf

tidak menyebabkan terjadinya peningkatan nilai pengangguran.

Pengaruh Angka Melek Huruf, Upah Minimum, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung antar variabel atau konstruk yang besarnya ditunjukkan oleh nilai signifikansinya pada level 0,05 dengan *P value* $< 0,05$ dan ditunjukkan oleh nilai *t-statistik* $> t$ -tabel = 1,98. Hasil analisis data untuk mengetahui tujuan penelitian kedua yaitu menganalisis pengaruh angka melek huruf, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Pengaruh Upah Minimum, Angka Melek Huruf, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	23.28527	1.911673	12.18057	0.0000
Upah Minimum	-1.22E-08	1.96E-07	-0.062345	0.9504
Angka Melek Huruf	-0.204311	0.022637	-9.025493	0.0000
Pengangguran	0.440809	0.159523	2.763299	0.0069

Sumber: data diolah, 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa secara langsung variabel upah minimum (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y2). Nilai *t*-hitung dari upah minimum (X1) terhadap kemiskinan (Y2) lebih kecil dari *t*-tabel (-0,062345 $<$ 1,98) dan nilai *P value* lebih dari 0,05 (0,9504 $>$ 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa upah minimum secara langsung berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti peningkatan nilai upah minimum tidak menyebabkan terjadinya peningkatan nilai kemiskinan.

Variabel angka melek huruf (X2) secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan (Y2). Nilai *t*-hitung dari angka melek huruf (X2) terhadap kemiskinan (Y2) lebih kecil dari *t*-tabel (-9,025493 $<$ 1,98) dan nilai *P value* kurang dari 0,05 (0,0000 $<$ 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa angka melek huruf secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti peningkatan nilai angka melek huruf tidak menyebabkan terjadinya peningkatan nilai kemiskinan.

Variabel pengangguran (X3) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan (Y2). Nilai *t*-hitung dari pengangguran (X2) terhadap kemiskinan (Y2) lebih besar dari *t*-tabel (2,763299 $>$ 1,98) dan nilai *P value* kurang dari 0,05 (0,0069 $<$ 0,05), sehingga dapat disimpulkan

bahwa pengangguran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini berarti peningkatan nilai pengangguran menyebabkan terjadinya peningkatan nilai kemiskinan.

Peran Pengangguran Memediasi Pengaruh Upah Minimum dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali

Kriteria dalam pengujian ini adalah jika Z-hitung $\leq 1,98$ maka H_0 diterima, berarti pengangguran bukan merupakan variabel mediasi. Sedangkan jika Z-hitung $> 1,98$ maka H_0 ditolak, berarti kinerja merupakan variabel mediasi. Hasil dari t-hitung dapat diketahui dengan melakukan uji Sobel. Uji Sobel dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2 + S_a^2 S_b^2}$$

$$Z = \frac{ab}{S_{ab}}$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat dinyatakan bahwa pengangguran tidak memediasi pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Nilai t-hitung dari uji pengaruh tidak langsung upah minimum (X1) terhadap kemiskinan (Y2) melalui pengangguran (Y1) lebih kecil dari t-tabel ($0,216003605 < 1,98$). Selanjutnya Nilai t-hitung dari uji pengaruh tidak langsung angka melek huruf (X2) terhadap kemiskinan (Y2) melalui pengangguran (Y1) lebih kecil dari t-tabel ($0,861834227 < 1,98$). Hal ini menggambarkan bahwa pengangguran tidak memediasi pengaruh angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Pembahasan

Pengaruh langsung upah minimum terhadap pengangguran di Provinsi Bali

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa secara langsung variabel upah minimum berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Bali. Tujuan penetapan kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh Pemerintah adalah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh yang dipkerjakannya. Kenaikan upah minimum dalam penelitian ini dapat menarik minat tenaga kerja untuk bekerja, sehingga upah yang didapatkannya dapat

digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatnya minat tenaga kerja untuk bekerja dapat mengurangi pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yacoub dan Firdayanti (2019) yang menyatakan bahwa upah minimum berdampak positif terhadap pengangguran.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengangguran. Hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum dapat menjadi beban bagi pengusaha untuk menjalankan usahanya. Meningkatnya beban usaha akibat kenaikan upah minimum tenaga kerja, cenderung membuat pengusaha untuk melakukan efisiensi biaya sehingga terjadi penurunan permintaan tenaga kerja. Penurunan permintaan tenaga kerja tersebut, secara langsung dapat menyebabkan angka pengangguran menjadi bertambah. Terlebih pada saat pandemi *Covid-19*, adanya pembatasan kegiatan menyebabkan gerak perusahaan menjadi terhambat, sehingga besar kemungkinan pengusaha melakukan efisiensi untuk tetap dapat melanjutkan usaha yang dijalankannya.

Pengaruh langsung angka melek huruf terhadap pengangguran di Provinsi Bali

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel angka melek huruf secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel pengangguran. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro, 2011). Orang yang berpendidikan lebih baik cenderung memiliki tingkat pendapatan yang lebih baik, karena orang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah. Orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibanding mereka yang berpendidikan rendah. Satu dari beberapa karakteristik pendidikan adalah kemampuan baca tulis yang ditunjukkan dengan indikator Angka Melek Huruf.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa melek huruf berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat terhindar dari pengangguran. Seseorang yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) jika tidak diikuti dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai, serta kemauan keras untuk bekerja maka akan terasa sulit untuk mendapatkan dan menggeluti suatu pekerjaan. Berkaca pada hal tersebut, akan lebih baik apabila seseorang yang telah melek huruf untuk tidak berpuas diri, namun sebaiknya dibekali pula oleh keterampilan yang memadai, serta kemauan untuk bekerja, sehingga seseorang tersebut dapat leluasa untuk memiliki pekerjaan dan turut berkontribusi dalam menekan angka pengangguran.

Pengaruh langsung upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa secara langsung variabel upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel kemiskinan. Meningkatnya upah minimum dapat menurunkan tingkat kemiskinan seiring dengan meningkatnya rata-rata upah para pekerja. Upah minimum yang meningkat dapat digunakan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehingga mereka dapat merasakan penghidupan yang layak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum saja tidak cukup untuk membuat seseorang terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, serta ketidakberdayaan seseorang untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta berbagai masalah yang berkaitan dengan pembangunan manusia. Oleh sebab itu, banyak hal yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan selain meningkatkan upah minimum untuk para pekerja.

Sharp et al (2000), bahwa salah satu sumber tingkat kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja. Dengan kualitas

penduduk usia kerja yang rendah, maka menjadi sulit memperoleh penghasilan dengan upah minimum sesuai yang diinginkan. Fields *et al* (2007) mengungkap hasil penelitiannya bahwa adanya dampak upah minimum terhadap klasifikasi ukuran kemiskinan absolut, dimana klasifikasi ukuran kemiskinan absolut ini antara lain berkaitan dengan garis kemiskinan. Dinyatakan pula bahwa ada hubungan yang erat antara upah minimum dan kemiskinan. Hasil penelitian ini sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Gung *et.al* (2019) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh langsung angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel angka melek huruf secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Meningkatnya angka melek huruf dapat menurunkan tingkat kemiskinan seiring dengan semakin meningkatnya kualitas SDM tersebut. Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang dapat membaca serta menulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan (BPS, 2011). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini, diharapkan para pemangku kepentingan untuk merumuskan cara dalam meningkatkan angka melek huruf sehingga diharapkan dapat berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Langeveld (dalam Bahan Ajar Pengantar Pendidikan 2006:25) bahwa "Pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaan dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain". Pendidikan juga berarti suatu usaha yang dijadikan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008) dengan hasil

penelitian bahwa variabel yang berpengaruh negatif paling besar dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin adalah pendidikan.

Sejalan dengan hasil penelitian ini, Ezebuilo dan Emmanuel (2014) dalam Yoga (2019) bahwa pendidikan tinggi memiliki kapasitas untuk mengurangi kemiskinan. Terdapat hubungan negatif antara pendidikan dengan kemiskinan, dimana semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat dalam artian semakin tinggi angka melek huruf, maka akan semakin kecil kemiskinan dalam masyarakat. Mereka yang memiliki pendidikan tinggi dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga kondisi ekonomi berada di atas mereka yang berpendidikan lebih rendah. Pengentasan kemiskinan dengan pendidikan dan berdampak juga mempengaruhi produktivitas tenaga kerja (Flor et al., 2006 dalam Aref, 2011). Dinyatakan pula bahwa peran penting pendidikan dalam pengurangan kemiskinan tidak bisa berdiri sendiri, solusi untuk kemiskinan adalah melalui multi disiplin ilmu.

Pengaruh langsung pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menyatakan bahwa variabel pengangguran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hasil tersebut menggambarkan bahwa semakin meningkatnya nilai pengangguran, maka akan menyebabkan meningkatnya nilai kemiskinan. Pengangguran berdampak pada berkurangnya pendapatan masyarakat, sehingga secara langsung dapat menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai. Seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini menyebabkan mereka cenderung tidak dapat memenuhi kehidupan secara layak serta dapat berujung pada jeratan kemiskinan.

Pengurangan produktivitas dan pendapatan masyarakat akibat adanya pengangguran tentu menjadi hal yang patut untuk dihindari agar tidak menimbulkan masalah kemiskinan serta masalah-masalah sosial lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2019) yang mengungkap bahwa peningkatan pengangguran berpengaruh terhadap peningkatan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali

atau tingkat pengangguran yang menurun mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali. Namun dalam penelitian Yoga (2019) mendapatkan hasil yang tidak signifikan. Sejalan dengan penelitian Osinubi (2005) yang juga menemukan hubungan yang searah antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Nigeria yang menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini terjadi melihat kenyataan orang yang menganggur di Nigeria terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan tidak teratur dan membuat banyak pekerja menjadi lebih kaya dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Peran pengangguran memediasi pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengangguran tidak memediasi pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini menggambarkan bahwa upah minimum lebih memberikan dampak terhadap kemiskinan dibandingkan dampak terhadap pengangguran. Kebijakan upah minimum merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan pekerja. Adanya kebijakan upah minimum ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pekerja, yaitu dapat meningkatkan taraf atau standar hidup pekerja. Peningkatan taraf atau standar hidup pekerja tentu berdampak baik pada pengurangan kemiskinan, karena pekerja dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui upah yang diterimanya.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penetapan upah minimum sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan banyak aspek. Penetapan upah minimum yang terlalu tinggi dapat pula menyebabkan pengangguran karena perusahaan merasa terbebani dengan tingginya biaya upah dari tenaga kerja yang dipekerjakannya. Akibat yang ditimbulkan adalah adanya langkah efisiensi yang diambil oleh perusahaan untuk memangkas beban tenaga kerja, hal ini berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan serta berimbas pada naiknya jumlah pengangguran. Bertambahnya jumlah pengangguran akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan karena pendapatan yang diperoleh kurang bahkan tidak mencukupi kebutuhan hidup yang layak tersebut.

Peran pengangguran memediasi pengaruh angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengangguran tidak memediasi pengaruh angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. Hal ini menggambarkan bahwa angka melek huruf yang mengindikasikan capaian tingkat pendidikan yang bisa ditempuh, lebih memberikan dampak terhadap kemiskinan dibandingkan dampak terhadap pengangguran. Angka melek huruf menyajikan informasi mengenai kemampuan penduduk dalam memahami informasi berbentuk tulisan. Angka melek huruf merupakan salah satu indikator pendidikan yang penting karena kemampuan membaca adalah titik awal dari proses pembelajaran. Semakin tingginya angka melek huruf, menandakan bahwa masyarakat telah mendapatkan pendidikan awal yang baik dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya.

Pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan. Hal ini terungkap dalam penelitian yang dilakukan Niazi dan Khan (2008) menemukan pentingnya pendidikan untuk mengurangi kemiskinan multidimensi dan penelitian pengaruh tinggi-rendahnya tingkat pendidikan terhadap kemiskinan oleh Ezebuilo and Emmanuel (2014) yang menemukan bahwa pendidikan tinggi memiliki kapasitas mengurangi kemiskinan.

Meskipun dalam penanggulangan kemiskinan, bukan hanya faktor pendidikan saja yang harus ditingkatkan, namun terdapat beberapa faktor lain yang harus ditingkatkan pula mengingat kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional. Seseorang dengan pendidikan yang baik, disertai dengan keterampilan dan wawasan yang mumpuni dapat berpeluang mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga secara langsung dapat terhindar dari jerat kemiskinan. Pendidikan dalam hal ini dapat membantu seseorang untuk terbebas dari masalah pengangguran dan kemiskinan. Berkaitan dengan pendidikan, seyogyanya Pemerintah dapat merumuskan program untuk mewujudkan pemerataan pendidikan sehingga seluruh masyarakat Indonesia berkesempatan untuk mengenyam

pendidikan yang layak. Pemerataan pendidikan tersebut dapat terwujud dengan adanya pembangunan fasilitas maupun infrastruktur pendidikan yang merata.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) upah minimum dan angka melek huruf berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran; (2) upah minimum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, angka melek huruf secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan; serta (3) pengangguran tidak memediasi pengaruh upah minimum dan angka melek huruf terhadap kemiskinan di Provinsi Bali.

Saran

Saran konstruktif sesuai hasil penelitian ini adalah (1) Pemerintah sebaiknya memperhatikan dan mempertimbangkan penetapan upah minimum dengan cermat melalui analisis komprehensif berbagai aspek sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pencari kerja tanpa menyulitkan dan merugikan pemberi kerja; (2) Perlunya program pemerataan sarana dan infrastruktur pendidikan serta distribusi tenaga pengajar yang berkualitas merata, sehingga angka melek huruf pada masyarakat dapat ditingkatkan; (3) Pemerintah dan pihak-pihak terkait sebaiknya merumuskan program multidimensi terpadu dan terintegrasi dalam pengentasan pengangguran serta kemiskinan, dengan harapan dapat menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Bali yang meningkat cukup signifikan selama dua tahun terakhir.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Penghargaan dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dr. Ir. I Nengah Karnata, M.Si. selaku Rektor dan Universitas Tabanan atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga melalui tulisan ini, penulis dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai tema pengangguran dan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aref, A. (2011). Perceived Impact of Education on Poverty Reduction in Rural Areas of Iran. *Life Science Journal, Iran*.
- Aurangzeb and Khola, A. (2013). Factors Affecting Unemployment: A Cross Country Analysis. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(1), hlm. 219-230.
- Chow, Mohammad Shafiur Rahman. (2013). Determinants of Unemployment in Bangladesh: A Case Study. *Developing Country Studies* Vol. 4, No.3.
- Ezebuilo R, Ukwueze and Emmanuel O, Nwosu. (2014). *Does Higher Education Reduce Poverty Among Youths In Nigeria?*. *Journal Asian Economic and Financial Review*, 2014, 4(1):1-19. Nigeria: University of Nigeria.
- Fields, Gary S., Baran Han and Ravi Kanbur. 2007. Poverty Effects of the Minimum Wage: The Role of Household Employment Composition. *Paper on Annual Convention of the Society of Labor Economics, Chicago, May 2007*. NY: Cornell University Ithaca.
- Gung, A., Rochaida E., Fitriadi. (2019). Pengaruh Upah Minimum dan Pendidikan serta inflasi terhadap Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan Antar Provinsi di Pulau Kalimantan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman* Vol. 4 No. 4. doi: <https://doi.org/10.29264/jiem.v4i4.6134>.
- Haughton, J dan Khandker, Shahidur R. (2012). *Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Handbook on Poverty and Equality* (Tim Penerjemah World Bank, penerj.) Jakarta: Salemba Empat dan World Bank.
- Mankiw, N. G. (2020). *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat. Alih Bahasa: Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- Megantara D. E. dan Budhi, M. K. S. (2020). Pengaruh Angka Melek Huruf dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal EP Unud* Vol. 9 No. 1, hal. 91-119.
- Niazi, Muh. Imran. and Khan, Atta Ullah. 2008. The Impact of Education on Multidimensional Poverty Across The Regions in Punjab. *Journal of Elementary Education*. Vol. 21 No. 1 pp. 77-89.
- Osinubi, Tokunbo Simbowale. (2005). Macroeconometric Analysis of Growth, Unemployment and Poverty in Nigeria. *Pakistan Economic and Social Review*. Vol. 43, No. 2 pp. 249-269. University of the Punjab.
- Panjawa, J. L. dan Soebagiyo, D. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 15 Nomor 1, hal. 48-54.
- Sharp, A.M. et al. 2000. *Economics of Social Issues, Fourteenth Edition*. Boston: Irwin McGraw-Hill.
- Siregar, H. dan Wahyuniarti, D. (2008). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. <http://deptan.go.id>.
- Seran, Sirius. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 10 No. 2, hal. 59-71.
- Soekartawi. 1996. *Pembangunan Pertanian untuk Mengentas Kemiskinan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sulistiawati dan Rini. (2012). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Eksos*, Vol 8. No. 3.
- Todaro M., P dan Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Yacoub, Y., Firdayanti, M. (2019). Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, No.ISBN: 978-602-53460-3-3.
- Yoga, I M. S. (2019). *Determinan Kemiskinan di Provinsi Bali*. Disertasi. <https://bali.bps.go.id> (diakses tanggal 10 Desember 2022)